200.000.000





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 April 2019/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG **SUB UNIT KERJA**

I. DATA PRIBADI

: INSIYATUN 1. Nama

Jabatan **KETUA** NHK 656315 3

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/3 m2 di SAMPANG, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 150.000.000 Rp.

MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	OK CH
D. SURAT BERHARGA	Rp.	11.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	11.000.000
Sub Total	Rp.	392.000.000
III. HUTANG	Rp.	2.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	390.000.000

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 4 September 2019
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Agustus 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG SUB UNIT KERJA

DATA PRIBADI

: LUDDIN 1. Nama

ANGGOTA Jabatan

3. NHK 637296

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

14.000.000 Rp.

MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	M	Maria	M
D.	SURAT BERHARGA			

Rp. Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

54.927.043

HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

68.927.043

III. HUTANG

Rp.

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

68.927.043

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 27 Agustus 2019.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



192.000.000





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Juli 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHALLI : ANGGOTA 2. Jabatan

: 632958

3. NHK II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 2.600.500.000

Tanah Seluas 1028 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 616.800.000

Tanah Seluas 77 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 46.200.000

Tanah Seluas 3500 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

Tanah Seluas 750 m2 di SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 187.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

MOTOR, YAMAHA NMIX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

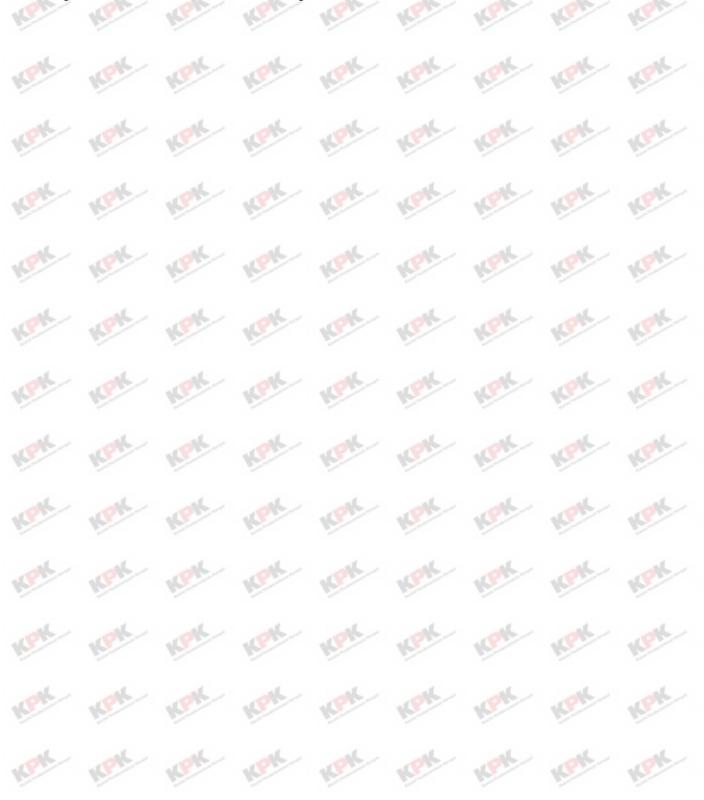
MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G F601RM Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	Walls Walls
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	at at
F. HARTA LAINNYA	Rp.	K. K.
Sub Total	Rp.	2.792.500.000
III. HUTANG	Rp.	KPIK KPIK
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.792.500.000





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 23 Agustus 2019.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Juli 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARIYANTO

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 632907

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah Seluas 95 m2 di SAMPANG, LAINNYA Rp. 250.000.000

2. Tanah Seluas 123 m2 di KOTABARU, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 351.000.000

 MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

12.000.000

MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, LAINNYA Rp. 120.000.000

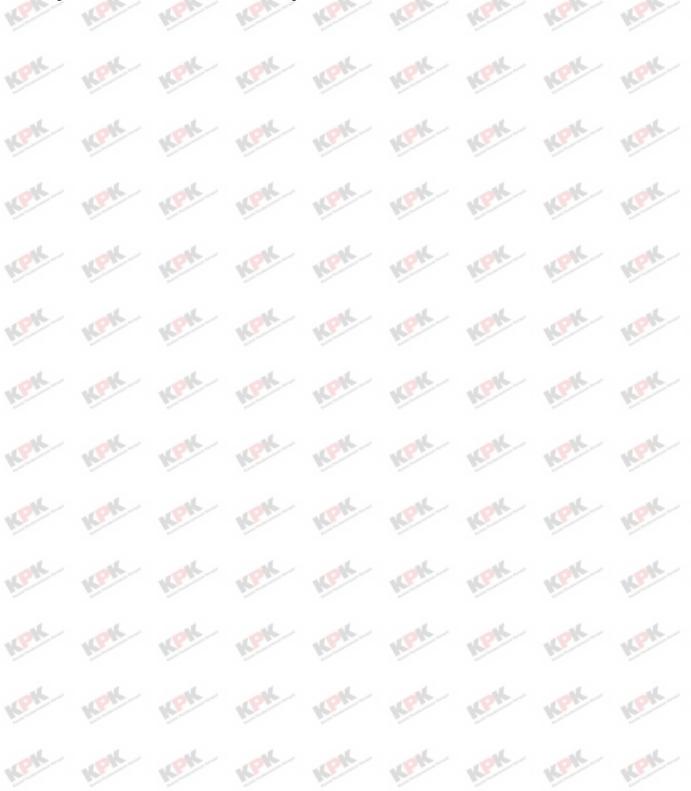
6. MOBIL, IZUZU DUMPTRUK Tahun 2012, LAINNYA Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	China Comment
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	891.008.032
F. HARTA LAINNYA	Rp.	10
Sub Total	Rp.	1.892.008.032
III. HUTANG	Rp.	CON WALL
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.892.008.032





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 23 Agustus 2019.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



400.000.000

Rp.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Juli 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG **SUB UNIT KERJA**

I. DATA PRIBADI

: YUNUS ALI GHAFI 1. Nama

ANGGOTA Jabatan

NHK 632875 3

A. TANAH DAN BANGUNAN

II. DATA HARTA

1. Tanah Seluas 219 m2 di SAMPANG, WARISAN Rp. 400.000.000	PK-	JOK JOK
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	42.000.000
1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, LAINNYA Rp. 20.000.000	al.	ah ah
2. MOTOR, ZUSUKI BEBEK Tahun 2013, LAINNYA Rp. 10.000.000	N. C.	Kour Kour
3. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2011, LAINNYA Rp. 12.000.000)	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000 <mark>.000</mark>
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	58.559.767
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Karr Karr
Sub Total	Rp.	503.559.767
III. HUTANG	Rp.	KPK KINK
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	503.559.767

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 23 Agustus 2019.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.